Halaman

## Kantor BGN Digeruduk 'Emak-emak' ......

#### Dari Halaman 1

kepada Keluarga dan Sekolah'.

Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyampaikan keprihatinan dan kemarahan atas terus berulangnya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak sekolah akibat program MBG.

Program yang diklaim sebagai solusi gizi anak sekolah itu justru menimbulkan krisiskesehatan, krisis akuntabilitas, dan krisis moral dalam tata kelola negara.

Mengutip data Jaringan memantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mereka menyinggung soal lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah.

"Alih-alih menjadi program wajib, selayaknya kembalikan program ini hanya kepada daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dan atau anak dari keluarga pra-sejahtera yang membutuhkan intervensi khusus perbaikan gizi," dikutip dari pernyataan Suara Ibu Indonesia.

Menurut mereka, anggaran MBG yang mengambil sebagian besar dana pendidikan harusnya bisa meningkatkan kesejahteraan guru, membenahi infrastruktur sekolah 3T, dan membangun kantin sehat berbasis komunitas yang dikelola sekolah, guru, dan orang tua.

Sentil pelibatan TNI-Polri di MBG Suara İbu Indonesia mengkhawatirkan langkah pemerintah melibatkan TNI/POLRI dalam rantai distribusi dan pengawasan program itu.

Langkah itu dinilai memperlihatkan militerisasi urusan sipil dan membuka ruang baru bagi penyalahgunaan kewenangan dalam ranah publik. Padahal, militer bukan lembaga pangan, dan tugas mereka bukan mengurus gizi atau makan anak-anak sekolah.

"Maka dari itu, kami menuntut pemerintah untuk hentikan proyek MBG di seluruh Indonesia. Program ini telah gagal menjamin keselamatan, kesehatan, dan inklusivitas anak-anak Cabut pelibatan TNI/POLRI dalam seluruh

aspek penyelenggaraan MBG maupun program lain yang berkaitan dengan ranah sipil," kata mereka.

Suara Ibu Indonesia juga meminta dilakukan audit nasional independen terhadap seluruh vendor, dapur sekolah, dan rantai pasok MBG, serta publikasikan hasilnya secara terbuka.

Suara Ibu Indonesia menyadari banyak pekerja informal, ibu-ibu, dan tenaga dapur sekolah yang selama ini menggantungkan penghidupan mereka pada program MBG.

Mereka juga memahami banyak anak-anak di sekolah membutuhkan asupan gizi tambahan.

"Namun, ketika pekerja kecil yang direkrut tidak memiliki perlindungan kerja yang memadai, dan makanan untuk anakanak tidak dikelola dengan standar keamanan yang ketat, maka program yang seharusnya menjadi bantuan justru berpotensi menjadi bencana," kata Suara Ibu Indonesia. (cnni/js)

### Ratusan Siswa Keracunan .....

#### Dari Halaman 1

kolah lain yakni SMKN 1 Cisarua, MA Bina Insani, MA Ponpes Al Furqon, MTs Ponpes Al Furgon, PAUD Al Muslimin, SDN 1 Garuda, dan SDN 1 Barukai. Total porsi MBG yang dibagikan sebanyak 3.649 porsi.

Koordinator Posko SMPN 1 Cisarua, Aep Kunaefi, menjelaskan pada hari ini setidaknya ada 60 siswa yang masih mengalami gejala dan tengah mendapat penanganan medis

Total keseluruhan dari kemarin ada 345 siswa. Dari jumlah itu. 285 siswa sudah kembali pulih, sementara sisanya masih dirawat," ujar Aep di Posko SMPN 1 Cisarua.

Para korban mengeluhkan gejala seperti pusing, mual, muntah, serta sesak napas. Sebagian dirawat di posko penanganan keracunan massal di sekolah tersebut, sebagian lagi dirujuk ke klinik dan rumah sakit terdekat.

"RS rujukan yang paling banyak menangani korban adalah Rumah Sakit Lembang, tapi rumah sakit lain seperti RS Cibabat dan RS Advent juga masih menerima pasien," kata Aep.

Aep menegaskan bahwa pendataan korban masih terus dilakukan oleh tim di lapangan untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak mendapat penanganan yang memadai.

Gelombang Keracunan MBG, SPPG ditu-

Mengutip dari detikJabar, keracunan massal imbas MBG yang dibagikan pada Selasa lalu

terjadi dalam dua gelombang.

Peristiwa itu diawali siswa SMP Negeri 1 Cisarua pada Selasa siang. Lalu pada Rabu ini, giliran siswa SMK Negeri 1 Cisarua dan SD Negeri 1 Garuda.

Mereka menerima MBG yang didistribusikan SPPG di Kampung Panyandaan, Cisarua.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail kemudian menutup sementara operasional SPPG tersebut usai keracunan massal. Pada hari kejadian, SPPG itu menyediakan olahan ayam black pepper, capcay wortel brokoli, tahu goreng, dan sepotong buah melon.

"Kami hentikan dulu operasional dari dapur SPPG di Cisarua setelah keracunan massal," kata Jeje, Rabu.

Penutupan sementara operasional itu berkaitan dengan proses investigasi untuk mengungkap penyebab keracunan massal akibat konsumsi MBG.

"Nanti kami cek kondisi SPPG-nya. Kita evaluasi terkait MBG ini supaya tidak terus bertambah dan tidak terulang kejadiannya," ucap

Namun pemerintah daerah belum menetapkan keracunan massal di Cisarua itu sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Berbeda dengan kasus keracunan massal gegara MBG yang menimba lebih dari seribu siswa di Kecamatan Cipongkor dan

"Belum (KLB), penanganannya lebih cepat daripada kasus waktu di Cipongkor. Sekarang kita fokus ke penanganan korban dulu," kata Jeje.

keracunan massal juga dialihkan menjadi daring selama beberapa hari kedepan. Mereka akan kembali masuk sekolah melihat perkembangan kondisi yang terjadi.

"Untuk beberapa hari dialihkan dulu jadi daring, untuk masuk seperti biasa akan melihat perkembangan di lapangan," kata guru SMPN 1 Cisarua, Fakhmi Nurdiansyah.

Penjelasan Dapur SPPG

Sebelumnya, Kepala Dapur SPPG Panyandaan, Setia Wiguna M menyebut proses memasak dilakukan sejak malam hari untuk mengejar waktu distribusi dini hari

"Dapur kami masak itu di jam 11 malam, dan kenapa jam 11 malam itu karena kami mengejar waktu sampai di jam 3 subuh, kemudian dengan proses pemakingan [packing] di jam 4. Jadi jadinya itu nunggu sejam untuk pendinginan," ujar Setia, Selasa malam, di Posko SMPN 1 Cisarua.

Menurutnya, dapur SPPG Panyandaan melayani ribuan porsi setiap harinya. Operasionalnya

pun didukung beberapa supplier. "Untuk hari ini [Selasa] di 3.649 [ompreng

Dalam penyediaan bahan baku, pihaknya menggandeng tiga pemasok berbeda, terdiri dari satu koperasi dan dua pemasok lain untuk bahan seperti beras, telur, dan daging ayam.

Terkait dugaan daging ayam yang menjadi sumber aroma tidak sedap dan dicurigai sebagai penyebab keracunan, Setia mengaku pihaknya

## Polda Sumut Diminta ......

#### Dari Halaman 1

Polres Aceh Singkil dalam menangkap kapal pukat trawl ilegal di perairan Aceh Singkil beberapa waktu lalu.

Andri Malau menyatakan, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi yang baik antara aparat penegak hukum dan masyarakat pesisir, termasuk peran aktif Panglima Laot Singkil dalam memberikan informasi lapangan.

"Kami sangat mengapresiasi Polairud Polres Aceh Singkil atas keberhasilannya menindak kapal trawl ilegal. Ini adalah bukti nyata bahwa kolaborasi antara aparat dan masyarakat dapat mewujudkan penegakan hukum yang efektif," ujar Andri, Rabu (15/10/2025).

Namun, Andri menyoroti kurangnya pengawasan terhadap praktik illegal fishing di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng), yang menurutnya masih marak terjadi.

"Kapal yang ditangkap di Singkil itu kabarnya milik warga Sibolga. Pertanyaannya, mengapa aparat di daerah kita—seperti Polairud Sibolga, Baharkam Mabes Polri, dan Lanal Sibolga—terkesan diam? Padahal praktik seperti bom ikan dan pukat trawl sudah terang-terangan berlangsung," tegasnya.

Andri mengungkapkan, ia bersama sejumlah aktivis lingkungan pernah berdiskusi dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dan unsur Forkopimda untuk membahas masalah ini.

Namun, seruan Bupati agar aparat bertindak tegas belum diindahkan.

"Sayangnya, hingga kini belum ada aksi nyata di lapangan. Padahal, Bupati sudah menyerukan langkah tegas. Ini menunjukkan lemahnya respons aparat penegak hukum di daerah," tambahnya.

Andri berharap Danlanal Sibolga yang baru, bersama Polairud Sibolga dan PSDKP, dapat segera mengambil langkah konkret untuk memberantas praktik illegal fishing di kawasan Sibolga-Tapteng.

"Contoh ketegasan sudah ada di tiga wilayah. Polair bersama Wagub Sumbar menangkap kapal trawl asal Sibolga, Lanal Nias menindak kapal pengguna bom ikan milik warga Tapteng pada bulan Mei lalu, dan kini Polairud Aceh Singkil juga berhasil menangkap kapal trawl asal Sibolga. Artinya, sumber masalah jelas, tinggal kemauan aparat saja," tandasnya.

Andri juga mendesak Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu Hermawan, dan Danlantamal Pantai Barat untuk memberikan perhatian penuh dan menertibkan anggotanya jika terbukti melindungi pelaku illegal fishing.

"Kalau ada oknum yang menjadi pengkhianat NKRI, kami minta Kapolda dan Danlantamal segera menertibkannya. Jangan biarkan mafia kapal bom dan trawl merajalela. Jika dibiarkan, ekosistem laut rusak, nelayan kecil rugi, dan marwah Presiden Prabowo dalam penegakan hukum laut tercoreng," pungkasnya. (A-10)

#### Selain itu, sekolah yang siswanya jadi korban masih melakukan evaluasi. (cnni/js) Hidayah Tokoh Sumut Jadi Korban Penipuan Online .....

menu]," katanya

## Dari Halaman 1

ditipu secara online dengan mengalami kerugian mencapai Rp254 juta," jelasnya, Rabu

"Pada 10 September 2025 personel akhirnya berhasil mengungkap kasus penipuan online itu dengan menangkap empat orang pelaku,' terangnya.

Doni mengungkapkan keempat orang pelaku penipuan online yang ditangkap itu berinisial MS, RJ, ES dan WD. Juga disita barang bukti berupa buku rekening, KTP, handphone.

"Kasus kejahatan scammer dengan memanipulasi data itu dilakukan pelaku MS dengan berkomunikasi melalui WhatsApp menghubungi korban Rahmat Shah dan mengaku senagai anak korban, Raline Shah," ungkapnya.

"Pelaku MS meminta uang kepada Rahmat Shah berulang kali dengan alasan untuk membeli emas antam dengan total Rp254 juta," kata Doni.

Saat menjalani aksinya pelaku MS melakukan pengecekan Nomor korban dari Get Contact. Lalu pelaku melakukan pengecekan aktivitas anak korban Raline Shah melalui media sosial "Ternyata benar ini, merupakan anak dari Rahmat Shah," bebernya(A-10)

# Penyaluran Hibah Sumut Kacau Balau .....

## Dari Halaman 1

Daerah Provinsi Sumut.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap adanya penyaluran dana hibah senilai Rp10 miliar lebih yang tidak sesuai peruntukan serta Rp158 miliar lebih belum dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan lengkap.

Temuan ini terjadi pada masa Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni bersama Sekretaris Daerah Arief S. Trinugroho yang kala itu memegang kendali birokrasi pemerintahan Sumatera Utara.

BPK menilai lemahnya mekanisme pengawasan dan verifikasi terhadap calon penerima hibah menjadi faktor utama munculnya permasalahan tersebut. Sejumlah penerima hibah dilaporkan tidak memenuhi syarat administrasi dan kelayakan, bahkan tidak sedikit yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

"Penyaluran hibah yang tidak disertai laporan kegiatan atau bukti pengeluaran dapat berpotensi menimbulkan kerugian daerah," tulis BPK dalam laporannya.

Selain itu, BPK juga mencatat adanya hibah yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam proposal awal. Kondisi ini memperkuat indikasi lemahnya pengawasan

di level Biro Kesra yang di maupun Sekretariat

Padahal, dana hibah yang dikelola Biro Kesra pada tahun 2024 yang dipimpin Drs H. Juliardi Zurdani Harahap M.Si, sejatinya ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun kenyataannya, sebagian dana tersebut diduga tidak sampai ke sasaran dan tidak jelas penggunaannya.

Pengamat kebijakan publik di Sumut menilai, temuan ini menjadi alarm keras bagi Pemprov Sumut agar menata ulang tata kelola hibah dan memperkuat akuntabilitas.

'Temuan BPK ini tidak bisa dianggap sepele. Saat publik menuntut transparansi, justru hibah yang harusnya menyejahterakan rakyat malah bermasalah. Ini mencerminkan lemahnya sistem kontrol di masa Pj Gubernur, Agus Fatoni," kata Muhri Fauzi Hafiz, Ketua Perkumpulan Demokrasi Masyarakat Empatbelas (PD-14)

Ia menambahkan, pola ini merupakan indikasi korupsi yang terstruktur, sistemik dalam masif atas pengelolaan hibah di Sumatera Utara.

"Ada tiga lapis potensi pelanggaran: manipulasi data, intervensi politik dalam SK Gubernur, dan pungutan tidak resmi dari penerima. Ini harus diaudit forensik oleh BPK dan diusut aparat penegak hukum khususnya kejaksaan,"

Sebagai informasi di tahun 2024, dari 33 kabupaten kota di Sumut, penerima dana hibah terbesar yakni kota Medan dengan jumlah 147 SK atau jumlah penerima sebesar Rp 29.373.750.000.00

intah Provinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti temuan tersebut menagih kembali dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan, dan memperbaiki sistem verifikasi agar penyaluran hibah berikutnya sesuai ketentuan.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Biro Sekda Provsu, Abu Kosim belum memberikan tanggapan resmi atas temuan tersebut. Melaui pesan singkat WhatsApp, sampai Berita ini terbit belum memberikan respon apapun.(A-10)

#### Sumatera Utara, Rabu (15/10/2025).

# tegasnya.

BPK telah merekomendasikan kepada Pemer-

# Kapolsek Patumbak Dilaporkan ke Poldasu .....

#### Dari Halaman 1

masuk PT Universal Gloves terhadap wartawan, Rabu (15/10/2025)

"Dari aksi demo hari ini, kita sudah 2 kali diterima, namun yang pertama mentah, malah kita disalah-salahkan. Namun yang kedua, setelah mendengarkan aksi damai kita, akhirnya kita melaporkan Kapolsek Patumbak dan kawan-kawan ke Propam Polda Sumut," ujar Kuasa Hukum Jurnalis, Riki Irawan SH, Rabu (15/10/2025)

Riki menjelaskan, adapun laporannya adalah dugaan atas pembiaran terjadinya penganiayaan dan perintangan yang dilakukan oknum preman di depan pintu masuk pabrik sarung tangan PT. Universal Gloves, tanggal 06 Oktober 2025, dimana pada saat itu pelapor melakukan peliputan adanya Unras dari warga terdampak bau busuk limbah cakang sawit," terangnya.

Riki berharap, Bidang Propam Polda Sumut untuk segera memproses laporan pengaduan wartawan.

"Terkait kasus ini kami meminta segera ditin-

dak lanjuti Paminal Propam Poldasu untuk memanggil dan melakukan tindakan hukum terkait pengaduan ini," harapnya, mengakhiri.

Diberitakan sebelumnya, Puluhan wartawan yang tergabung dalam Aksi Demo Solidaritas Jurnalis Sumut melakukan unjuk rasa di Mapoldasu. Adapun salah satu tuntutan massa adalah copot Kapolsek Patumbak, Kompol Daulat Simamora karena tidak mampu menangkap para pelaku penganiayaan dan intimidasi wartawan saat meliput demo di PT Universal Gloves (UG), Rabu (15/10/2025). (A-11)

# Sejarah Air dan Keserakahan Kota ......

### Dari Halaman 1

hitam, mengalir pelan seperti menanggung beban sejarah yang dilupakan.

Banjir di Medan bukan hanya persoalan teknis, tapi juga moral. Ini tentang bagaimana pemerintah dan warga secara bersama-sama menyingkirkan sungai dari kesadaran kota. Sungai dianggap masalah, bukan kawan. Padahal, setiap kali hujan deras turun dan air meluap ke jalan-jalan kota, itu cara alam mengingatkan bahwa "kalian telah menutup jalan pulangku."

Sementara di ruang-ruang rapat, proyekproyek besar terus digulirkan atas nama pen-

anganan banjir. Kolam retensi, pompa, hingga dinding penahan air semuanya dibangun megah, tapi jarang menyentuh akar masalah. Tak ada keberanian untuk menertibkan bangunan di bantaran, tak ada kebijakan serius membuka ruang hijau di tepian sungai. Kota ini ingin melawan air dengan beton, bukan dengan kesadaran ekologis.

Ironinya, tiap tahun anggaran miliaran rupiah dikucurkan untuk proyek drainase dan normalisasi sungai. Tapi hasilnya tetap sama. Air kembali ke jalan, bukan ke sungai. Mungkin karena dalam tata ruang kota, sungai memang tak lagi punya tempat. Ia diusir, disempitkan, dan diubah jadi saluran beton yang kering di musim

kemarau, tapi mengamuk di musim hujan.

Bila kota terus memunggungi sungai, maka setiap proyek hanyalah kamuflase dari keserakahan. Di balik banjir, selalu ada cerita tentang tanah yang dijual, ruang hijau yang dihapus, dan izin bangunan yang longgar demi keuntungan sesaat. Air tak pernah berdusta, ia akan selalu kembali menuntut ruang yang dirampas

Medan mestinya belajar dari masa lalunya sendiri. Kota ini lahir dari sungai, dan akan mati bila terus melupakannya. Menata sungai bukan soal proyek, tapi soal menata kesadaran bahwa air bukan musuh, melainkan guru yang paling sabar.(\*)

# Bukan Makan Berisiko

#### Dari Halaman 1

keracunan di sejumlah daerah. Isu inilah yang memicu keresahan para ibu kelompok yang paling tahu seperti apa makanan yang aman untuk anak-anak mereka.

Secara konseptual, MBG adalah program mulia. Pemerintah ingin memastikan setiap anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup tanpa membebani ekonomi keluarga. Ini sejalan dengan semangat pembangunan sumber daya manusia unggul. Namun, niat baik bisa kehilangan maknanya bila tata kelola dan pengawasan lapangan tidak matang.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa makanan dibagikan tanpa uji higienitas yang ketat, penyedia katering tidak terstandarisasi, dan rantai distribusi tidak diawasi tenaga ahli gizi. Akibatnya, di sejumlah wilayah muncul kasus keracunan massal yang melibatkan ratusan siswa. Dalam konteks kebijakan publik, satu kasus saja sudah cukup untuk menuntut perbaikan sistemik.

Yang membuat situasi semakin sensitif adalah pelibatan TNI dan Polri dalam pendistribusian makanan. Pemerintah berdalih bahwa peran aparat dibutuhkan demi memastikan ketertiban dan ketepatan distribusi. Namun, bagi sebagian masyarakat, langkah ini terasa janggal. Mengapa program gizi anak perlu dijaga aparat bersen-

Pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, apalagi pangan dan gizi, menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak percaya pada mekanisme sipil sendiri. Padahal, dalam kebijakan sosial, yang dibutuhkan bukan otoritas koersif, melainkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Ketika kepercayaan itu terganggu, program sebaik apa pun akan kehilangan legitimasi moral.

Masalah yang muncul dalam MBG sejatinya bukan hanya soal gizi, melainkan soal tata kelola publik. Ketika kontraktor dipilih tanpa transparansi, pengawasan diserahkan pada instansi non-ahli, dan komunikasi publik dilakukan secara terburu-buru, maka risiko kegagalan menjadi besar.

Padahal, Indonesia memiliki banyak ahli gizi, akademisi, dan organisasi profesi yang siap membantu. Mengapa mereka tidak lebih banyak dilibatkan? Pemerintah seharusnya menjadikan pelaksanaan MBG sebagai kolaborasi sosial, bukan proyek administratif semata.

Demo emak-emak di depan kantor BGN sebetulnya mengandung pesan moral yang kuat. Para ibu bukan menolak program bergizi, tetapi menolak pengelolaan yang ceroboh dan tidak transparan. Mereka ingin dilibatkan dalam pengawasan, penyusunan menu, hingga pemantauan pelaksanaan di sekolah.

Dalam banyak kebijakan sosial, partisipasi warga terutama ibu rumah tangga terbukti menjadi faktor keberhasilan. Pemerintah perlu belajar bahwa pemberdayaan bukan hanya soal memberi makanan gratis, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengontrol pelaksanaannya.

Program MBG hanya akan berhasil bila disertai tiga hal: transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi. Transparansi dalam pengadaan dan distribusi makanan; akuntabilitas terhadap setiap kasus yang muncul; dan kolaborasi antara pemerintah, ahli gizi, sekolah, serta masyarakat.

Memberi makan anak bangsa bukan sekadar program sosial, melainkan tanggung jawab moral dan politik negara. Bila makanan yang dibagikan justru membahayakan, maka negara sedang mengikis martabatnya sendiri.

Aksi emak-emak di depan kantor BGN seharusnya tidak dipandang sebagai gangguan, melainkan wake-up call bagi pemerintah untuk memperbaiki diri. Karena di balik teriakan dan spanduk mereka, ada pesan sederhana namun mendalam: "Kami tidak menolak makan bergizi, kami hanya menolak makan berisiko."